

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Telusuri Motif TGUPP Rangkap Jabatan

Desakan dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen

JAKARTA - Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) mengapresiasi kinerja DPRD DKI yang menemukan adanya anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang rangkap jabatan. Hanya saja, politisi Kebon Sirih harus menyelidiki motif double job tersebut.

"DPRD sudah harus melakukan penyelidikan, apakah motif yang melatarbelakangi seseorang seperti Haryadi ini sampai perlu merangkap dua jabatan," ungkap Peneliti Formappi Lucius Karus kepada INDOPOS saat dihubungi, Kamis (12/12/2019).

Lucius mengatakan, DPRD DKI bisa merekomendasikan pemecatan terhadap TGUPP apabila ditemukan unsur kepentingan pribadi untuk mendapat lebih banyak tunjangan atau memperkaya diri.

Dia menganggap, jabatan ganda TGUPP seolah ada keistimewaan, sehingga harus rangkap jabatan. "DPRD bisa merekomendasikan pemecatan jika ditemukan unsur kepentingan pribadi terlebih untuk mendapatkan banyak tunjangan atau untuk memperkaya diri sendiri," jelas Lucius.

DPRD DKI, sambung Lucius, sudah bertindak tepat dengan menyoroiti anggaran dan menemukan beberapa anggota TGUPP yang double job. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan juga seharusnya memberi penjelasan secara langsung. "Rangkap jabatan selalu tak baik bagi iklim pemerintahan yang bersih dan berintegritas," kata dia.

Anggota DPRD DKI Jakarta Achmad Yani menyatakan, pihaknya telah meminta TGUPP yang merangkap jabatan mengembalikan gajinya yang double. "Terhadap anggota TGUPP yang merangkap



Terhadap anggota TGUPP yang merangkap jabatan dan menerima penghasilan double dari sumber APBD, agar mengembalikan".

Achmad Yani
Anggota DPRD DKI Jakarta

jabatan dan menerima penghasilan double dari sumber APBD, agar mengembalikan," tutur dia kepada INDOPOS di gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2019).

Yani menyampaikan, adanya anggota TGUPP yang merangkap jabatan terungkap saat rapat pembahasan rancangan APBD 2020 di komisi DPRD DKI. Banggar juga meminta Pemprov DKI mengevaluasi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) TGUPP.

Tujuannya agar tupoksi TGUPP tidak tumpang tindih dengan tupoksi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan unit kerja perangkat daerah (UKPD). "Agar tupoksi TGUPP lebih terukur, maka perlu ada evaluasi dalam melaksanakan tugasnya dan tidak duplikasi dengan tupoksi SKPD/UKPD," kata Yani.

Sesuai Peraturan Gubernur No 16/2019 tentang TGUPP, Yani menuturkan, keberadaan TGUPP diperlukan Gubernur Anies Baswedan untuk mempercepat penyerapan anggaran dan menampung aspirasi masyarakat dengan cepat.

Namun, jumlahnya yang mencapai 67 orang pada 2019 harus dikurangi. "Jumlah tersebut sesuai keputusan Banggar perlu ada pengurangan menjadi 50 anggota di tahun 2020," imbuh Yani. (aen)